



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 66 /B.03/HK/2024**

#### **TENTANG**

#### **PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu disusun perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:
- a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan
  - c. Perubahan Peraturan Gubernur hanya memuat terkait dengan:
    1. diperintahkan oleh peraturan yang lebih; dan
    2. telah memiliki petunjuk teknis dari Kementerian terkait.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa;
  - b. untuk mengatasi keadaan konflik;
  - c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;
  - d. adanya akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
  - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 1 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:
- a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan
  - c. Perubahan Peraturan Gubernur hanya memuat terkait dengan:
    1. diperintahkan oleh peraturan yang lebih; dan
    2. telah memiliki petunjuk teknis dari Kementerian terkait.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa;
  - b. untuk mengatasi keadaan konflik;
  - c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;
  - d. adanya akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
  - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 1 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 66 /B.03/HK/2024  
 TANGGAL : 15 - 1 - 2024

**PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI PENGUSUL</b>	<b>JUDUL PERGUB</b>	<b>MATERI POKOK/DASAR PENYUSUNAN RAPERGUB</b>
I.	Dinas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	Tindaklanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
II.	Dinas Perkebunan	Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2024	Tindaklanjut Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-134/PK/2023.
III.	Dinas Perhubungan	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
		2. Keselamatan Pengguna Jalan	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
		3. Keselamatan Pengguna Sepeda	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
IV.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
V.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Pedoman Pelaksanaan Uang Jaminan Atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang Berstatus Jalan Provinsi	Ketentuan Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
VI.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pengelolaan Keuangan SMK BLUD	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
		2. Sumber Daya Manusia dan Remunerasi SMK BLUD	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
		3. Pengadaan Barang dan Jasa SMK BLUD	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
		4. Kerjasama SMK BLUD	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
		5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024/2025	Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB.
		6. Bosda Afirmasi	Tindaklanjut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Daerah.
		7. Kurikulum Anti Korupsi	Tindaklanjut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagai Muatan Lokal Wajib.

		8. Muatan Lokal Bahasa Lampung	Tindaklanjut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib.
VII.	Satuan Polisi Pamong Praja	1. SOP dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja	Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
		2. Kode Etik PPNS	Pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan norma atau nilai yang mengikat dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenang PPNS.
		3. Sekretariat PPNS	Pedoman pembentukan Sekretariat PPNS Provinsi Lampung pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
		4. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
VIII.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Melalui Corporate University Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
IX.	Badan Pendapatan Daerah	1. Pemberian Keringanan atau Pembebasan Denda PKB, BBNKB Kedua, dan Penghapusan Pajak Progresif	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		2. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		3. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk jenis pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PAP, Pajak Alat Berat dan Pajak Rokok	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		4. Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

		5. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
X.	Rumas Sakit Jiwa Daerah	Remunerasi BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
XI.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	1. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
		2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
		3. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
		4. Tata Kelola, SPM Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.
XII.	Biro Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan dan Pengawasan Dalam Bentuk Fasilitasi, Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Zakat	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
XIII.	Biro Organisasi	1. Perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD.
		2. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Dilingkungan Instansi Pemerintah.
		3. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Pemberhentian Penghasilan Pejabat Administrasi yang berdampak Penataan Birokrasi di Instansi Pemerintah yang Bersumber dari APBD.
		4. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
		5. Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Hari Kerja Instansi Pemerintah.

XIV.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kota Baru	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kotabaru Lampung.
------	---	--	---

 **GUBERNUR LAMPUNG,**  
  
**ARINAL DJUNAJDI**

XIV.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kota Baru	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kotabaru Lampung.
------	---	--	---

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**